



BANTUAN SOSIAL PENANGANAN DAMPAK INFLASI

Kaji Program Tepat Sasaran, Gulirkan Akhir Bulan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya turut menyiapkan berbagai skema guna penanganan dampak inflasi yang berpotensi terjadi usai kenaikan harga bahan bakar minyak. Salah satunya berupa bantuan sosial yang tepat sasaran guna memperkuat program yang digulirkan Pemerintah Pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya Ir Aman Yuridijaya, mengungkapkan pihaknya menargetkan penyaluran bantuan sosial tersebut dapat digulirkan paling cepat akhir bulan ini. "Saat ini kami sedang melakukan kajian untuk menyiapkan program yang dinilai tepat untuk kebutuhan penyaluran bantuan sosial dari dana transfer umum tersebut," jelasnya, Senin (12/9).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi 2022, menyatakan pemerintah daerah wajib

menyalurkan dua persen dari dana transfer umum untuk bantuan sosial.

Bantuan sosial dapat diarahkan untuk ojek, pelaku UMKM, nelayan serta untuk pemberian subsidi transportasi atau angkutan umum hingga penciptaan lapangan kerja. Bantuan sosial tersebut masuk dalam dana perlindungan sosial untuk periode Oktober-Desember.

Aman memastikan rumusan program penyaluran bantuan sosial tersebut dapat segera disusun untuk kemudian disampaikan ke legislatif sebelum direalisasikan. Bentuk bantuan sosial lebih ditu-

jukan untuk perlindungan sosial ke masyarakat khususnya masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah. "Penyisiran data juga kami lakukan agar masyarakat atau kelompok rentan yang belum tersentuh bantuan dari pusat bisa terakomodir," imbuhnya.

Total nilai anggaran untuk program bantuan sosial tersebut sekitar Rp 3,7 miliar. Dana itu merupakan penyisihan dua persen dari dana transfer umum yang akan diterima Pemkot Yogya pada triwulan keempat tahun ini.

Selain menyusun program bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat, upaya yang ditempuh Pemkot Yogya untuk mengendalikan inflasi di antaranya dengan membangun suasana psikologis yang kondusif di masyarakat agar tidak muncul gejala yang berdampak

negatif. "Selain itu, kami juga memastikan jalur distribusi tetap lancar karena Yogyakarta bukan kota produsen dan akan selalu mengandalkan pasokan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Oleg Yohan mengusulkan agar alokasi dua persen dari dana transfer umum tersebut masuk dalam alokasi bantuan tak terduga (BTT). "Bantuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk disalurkan ke masyarakat yang belum menerima bantuan sosial untuk subsidi gaji dan subsidi UMKM. Saya kira, jumlahnya masih banyak," terangnya.

Agar bantuan tepat sasaran, Oleg berharap agar pekerja sosial masyarakat yang ada di wilayah bisa turun tangan melakukan pendataan sekaligus memastikan tidak ada penerima ganda. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005